

PENGUATAN MANAJEMEN PROYEK KEGIATAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN DI KOMUNITAS

Ahmad Jet Alamin A¹, Parlaban Karo-Karo², Raliman Febby P. Purba S³
Universitas Efarina, Indonesia^{1,2,3}
Email: Jet.ahmad196@gmail.com

Abstrak

Kegiatan PKM ini bertujuan memperkuat manajemen proyek untuk pelaksanaan kegiatan sosial dan kemasyarakatan di komunitas mitra. Permasalahan yang umum ditemukan meliputi perencanaan kegiatan yang belum terstruktur, pembagian tugas yang tidak jelas, pengelolaan relawan dan komunikasi yang belum rapi, risiko kegiatan (perizinan, cuaca, keamanan, logistik) belum dipetakan, serta pelaporan dan evaluasi pascakegiatan yang belum standar. Program dilaksanakan melalui asesmen kebutuhan, pelatihan inti manajemen proyek, workshop penyusunan perangkat kerja (project charter, WBS, timeline, RACI, anggaran, manajemen risiko, SOP), simulasi eksekusi kegiatan, serta pendampingan penerapan pada satu proyek komunitas. Luaran berupa paket alat (toolkit) manajemen proyek yang siap pakai dan dapat direplikasi untuk kegiatan komunitas berikutnya.

Kata kunci: *Manajemen Proyek, Kegiatan Sosial, Kemasyarakatan Komunitas*

Abstract

This Community Service Program (PKM) activity aims to strengthen project management for the implementation of social and community activities in partner communities. Common problems encountered include unstructured activity planning, unclear task allocation, poor volunteer management and communication, unmapped activity risks (permits, weather, security, logistics), and substandard post-activity reporting and evaluation. The program is implemented through needs assessments, core project management training, workshops on developing work tools (project charter, WBS, timeline, RACI, budget, risk management, SOP), activity execution simulations, and implementation assistance for one community project. The output is a ready-to-use project management toolkit that can be replicated for subsequent community activities.

Keywords: *Project Management, Social Activities, Community Outreach*

PENDAHULUAN

Komunitas sering menjalankan program sosial dan kemasyarakatan seperti bakti sosial, edukasi publik, kegiatan lingkungan, bantuan bencana, maupun pemberdayaan masyarakat. Aktivitas-aktivitas tersebut umumnya melibatkan banyak pihak, memiliki keterbatasan waktu, serta mengandalkan sumber daya sukarela yang tidak selalu seragam kapasitasnya. Dalam kondisi ini, pelaksanaan kegiatan dapat menghadapi berbagai tantangan operasional yang berpotensi mengganggu kelancaran program.

Salah satu masalah yang kerap muncul adalah perencanaan kegiatan yang belum terstruktur, sehingga arah kerja, tujuan, dan batasan kegiatan (scope) tidak jelas sejak awal. Akibatnya, tim menjadi sulit memastikan prioritas pekerjaan, menentukan kebutuhan logistik, serta mengatur tahapan pelaksanaan dari persiapan hingga penutupan. Ketika perencanaan tidak rapi, program yang seharusnya berjalan sesuai rencana dapat mengalami keterlambatan, pembengkakan biaya, bahkan hasil kegiatan yang kurang terdokumentasi dengan baik.

Selain itu, pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan proyek sering kali tidak jelas. Relawan dapat berganti atau kehadirannya fluktuatif, sementara komunikasi lintas divisi melalui chat maupun koordinasi informal tidak selalu terdokumentasi. Kondisi ini berisiko menimbulkan miskomunikasi, duplikasi pekerjaan, serta kekeliruan dalam eksekusi tugas lapangan, termasuk pada kegiatan yang membutuhkan ketepatan koordinasi seperti pengadaan, distribusi, dokumentasi, dan pengendalian keamanan.

Tantangan berikutnya adalah manajemen risiko yang belum matang. Kegiatan sosial dan kemasyarakatan dapat dipengaruhi faktor eksternal seperti perizinan, cuaca, keamanan, serta

ketersediaan logistik dan donasi yang tidak pasti. Jika risiko tidak dipetakan sejak awal, komunitas cenderung merespons secara reaktif saat masalah muncul, sehingga peluang terjadinya gangguan jadwal dan penurunan kualitas pelaksanaan menjadi lebih besar.

Di sisi lain, pelaporan dan evaluasi pascakegiatan sering belum standar dan belum konsisten. Tanpa format laporan yang jelas serta sistem evaluasi yang sederhana namun teratur, komunitas sulit menilai capaian kegiatan berdasarkan indikator yang disepakati, mengukur kesesuaian antara rencana dan realisasi, serta menyusun pembelajaran untuk kegiatan berikutnya. Padahal, dokumentasi yang rapi dan evaluasi yang terarah sangat penting untuk menjaga akuntabilitas, meningkatkan kualitas program, dan memudahkan replikasi kegiatan di masa mendatang.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, diperlukan penguatan manajemen proyek agar komunitas dapat bekerja lebih terencana, akuntabel, dan berdampak. Melalui pendekatan yang menekankan siklus perencanaan–eksekusi–kontrol–pelaporan, komunitas dibekali kemampuan untuk menyusun perangkat kerja yang terstruktur, memperjelas peran melalui pembagian tanggung jawab, serta membangun sistem monitoring dan pelaporan yang konsisten. Dengan demikian, kegiatan sosial dapat berjalan lebih efektif: ketepatan waktu meningkat, efisiensi anggaran terjaga, risiko lebih siap diantisipasi, dan kualitas laporan serta evaluasi menjadi lebih baik sebagai dasar keberlanjutan program komunitas.

LANDASAN TEORI

Kajian pustaka dalam kegiatan ini berfokus pada teori dan praktik manajemen proyek yang relevan untuk organisasi nirlaba/komunitas, terutama ketika proyek sosial dijalankan dengan sumber daya terbatas dan melibatkan banyak pihak. Dalam konteks nonprofit, manajemen proyek dipandang sebagai pendekatan sistematis untuk memastikan tujuan sosial dapat diterjemahkan menjadi rencana kerja yang jelas, pelaksanaan yang terkoordinasi, serta pelaporan yang akuntabel. Literatur seperti Anheier (2014) menekankan bahwa efektivitas organisasi nonprofit sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen, termasuk kemampuan merancang dan mengelola program agar selaras dengan misi serta kebutuhan penerima manfaat.

Keberhasilan proyek juga dapat dilihat melalui konsep “project success” yang bersifat multidimensional. Shenhar et al. (2001) menjelaskan bahwa kesuksesan proyek tidak hanya berkaitan dengan tercapainya waktu dan biaya, tetapi juga mutu hasil, manfaat strategis, serta dampak yang dirasakan oleh pemangku kepentingan. Sejalan dengan itu, Ebrahim & Rangan (2014) menekankan pentingnya pengukuran kinerja sosial (social performance) agar organisasi dapat menilai skala dan ruang lingkup dampak, bukan sekadar menyelesaikan aktivitas. Oleh karena itu, proyek komunitas perlu memiliki indikator yang dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi, termasuk output dan outcome. Dalam perumusan tujuan serta kerangka kesuksesan proyek, literatur juga mengulas metode pendefinisian keberhasilan secara lebih logis dan terukur. Baccarini (1999) memperkenalkan logical framework yang membantu organisasi mendefinisikan keberhasilan melalui hubungan antara tujuan, deliverables, serta proses kerja. Literatur lain seperti Bryde (2003) dan Kerzner (2017) menyoroti bahwa kinerja manajemen proyek dipengaruhi oleh desain perencanaan, pengendalian, dan mekanisme koordinasi yang baik. Dengan demikian, penguatan kapasitas komunitas perlu mencakup kemampuan menyusun perangkat kerja (misalnya tujuan, ruang lingkup, rincian aktivitas) agar pelaksanaan tidak berjalan “secara ad-hoc”.

Selain perencanaan, kajian pustaka juga menekankan pentingnya tata kelola proyek (project governance) dan peran pemangku kepentingan. Crawford & Helm (2009) menunjukkan nilai manajemen proyek dalam sektor publik, terutama untuk meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas. Bourne (2015) serta Zwikael & Smyrk (2015) menekankan bahwa hubungan stakeholder dan keseimbangan antara kontrol dan kepercayaan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi. Dalam proyek sosial komunitas, pembagian peran yang jelas, mekanisme koordinasi, serta dukungan pihak terkait menjadi faktor kunci agar alur kerja, logistik, komunikasi, dan pengambilan keputusan berjalan efektif.

Manajemen risiko menjadi bagian penting dalam kajian pustaka karena proyek sosial berhadapan dengan ketidakpastian. Hillson (2002) menjelaskan pengembangan proses risiko untuk tidak hanya menghindari kegagalan, tetapi juga mengelola peluang. Literatur proyek juga menegaskan bahwa perencanaan risiko yang disertai rencana kontinjensi akan meningkatkan ketahanan implementasi ketika terjadi perubahan kondisi (misalnya perubahan jadwal, izin, cuaca, atau ketersediaan logistik). Kerangka ini juga sejalan dengan pendekatan manajemen proyek modern yang memandang proyek sebagai sistem yang perlu dipantau secara berkelanjutan (Maylor, 2010; Kerzner, 2019).

Terakhir, kajian pustaka mendukung perlunya pendekatan monitoring, evaluasi, dan pengukuran kinerja yang terstruktur. Kaplan (2001) mengaitkan pengukuran kinerja strategis pada organisasi nonprofit, sedangkan Bryson (2018) menempatkan perencanaan strategis sebagai fondasi pengendalian program.

Literatur tentang faktor kritis implementasi (Pinto & Slevin, 1987) dan keterlibatan dukungan manajemen (Young & Poon, 2013) memperkuat argumen bahwa proyek akan lebih berhasil ketika perencanaan, tata kelola, komunikasi, dan pengendalian berjalan secara konsisten. Dengan demikian, penguatan manajemen proyek di komunitas perlu menghasilkan toolkit dan SOP yang dapat digunakan untuk merencanakan proyek, mengelola risiko, membangun sistem pelaporan, serta memastikan evaluasi dilakukan secara sederhana namun konsisten berdasarkan indikator yang disepakati

METODE

Metode penelitian pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan pendekatan penguatan kapasitas (capacity building) berbasis praktik melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap awal dilakukan melalui koordinasi dan asesmen, yakni melakukan wawancara, meninjau kegiatan sebelumnya, serta mengidentifikasi hambatan dan kebutuhan komunitas mitra. Informasi hasil asesmen kemudian dijadikan dasar untuk menentukan materi pelatihan dan bentuk pendampingan yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Tahap berikutnya adalah pelatihan manajemen proyek yang menekankan penguasaan konsep serta aplikasi pada konteks kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Materi inti mencakup dasar manajemen proyek (tujuan, ruang lingkup/scope, deliverables), siklus proyek, peran, komunikasi proyek, serta kontrol pelaksanaan. Peserta juga dikenalkan pada instrumen perencanaan dan pengendalian yang umum digunakan dalam proyek, dengan penekanan pada penerapan yang sederhana namun terstruktur agar dapat langsung digunakan oleh komunitas.

Selanjutnya dilaksanakan workshop penyusunan perangkat kerja serta simulasi. Dalam workshop, peserta menyusun dokumen proyek untuk kegiatan nyata, seperti project charter, WBS, timeline sederhana (misalnya Gantt), RACI, anggaran/RAB dan cashflow sederhana, risk register dan rencana kontinjensi, rencana komunikasi, SOP kegiatan, hingga checklist eksekusi hari-H. Sementara itu, simulasi digunakan untuk melatih kesiapan tim melalui skenario rapat koordinasi, perubahan jadwal, penanganan risiko, dan eskalasi masalah agar komunitas siap menghadapi dinamika kegiatan.

Tahap terakhir adalah pendampingan pilot dan evaluasi. Pendampingan dilakukan dengan mengimplementasikan perangkat kerja pada satu proyek komunitas selama 2–4 minggu (menyesuaikan kebutuhan), disertai monitoring melalui rapat rutin dan pengendalian milestone. Evaluasi dilakukan untuk menilai penerapan perangkat kerja, mengidentifikasi pembelajaran yang muncul selama pilot, serta memfinalisasi toolkit agar siap direplikasi pada kegiatan berikutnya. Indikator yang digunakan dapat mencakup ketepatan waktu, deviasi anggaran, capaian penerima manfaat, tingkat kehadiran relawan, kepuasan mitra/penerima manfaat, serta kelengkapan dokumentasi dan laporan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Penguatan Manajemen Proyek Kegiatan Sosial dan Kemasyarakatan di Komunitas menghasilkan peningkatan kapasitas komunitas mitra dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, serta melaporkan proyek sosial secara lebih terstruktur. Penguatan ini menargetkan pengurus inti dan koordinator program agar mampu mengelola proyek tidak lagi secara ad-hoc, melainkan melalui tahapan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu hasil utama yang dicapai adalah terbentuknya pemahaman yang lebih seragam di antara peserta mengenai konsep dasar manajemen proyek untuk konteks kegiatan sosial. Peserta memahami keterkaitan antara tujuan kegiatan, ruang lingkup (scope), deliverables, serta kebutuhan penjadwalan kerja. Dengan pemahaman tersebut, komunitas lebih siap menyusun arah kerja yang sama sejak awal, sehingga pelaksanaan program memiliki landasan yang kuat dan mengurangi potensi pekerjaan yang tumpang tindih.

PkM juga menghasilkan kemampuan peserta dalam menyusun perangkat kerja proyek melalui workshop dan pendampingan. Dokumen-dokumen inti yang disusun dalam toolkit mencakup project charter, WBS, timeline, RACI, RAB & cashflow sederhana, risk register, rencana komunikasi, serta SOP kegiatan. Keberadaan perangkat ini membuat setiap anggota tim memiliki rujukan operasional yang jelas, termasuk alur koordinasi dan standar kerja ketika kegiatan sudah memasuki fase eksekusi.

Dalam proses pendampingan pilot, komunitas menunjukkan peningkatan pada aspek ketepatan waktu dan pencapaian milestone. Dampak yang terlihat adalah rencana kegiatan menjadi lebih terukur melalui timeline mingguan/harian, sehingga koordinasi dan eksekusi tidak lagi bergantung pada komando informal. Jadwal kerja juga lebih mudah dipantau melalui evaluasi rutin, baik untuk memastikan progres maupun untuk melakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan kondisi.

Selain aspek waktu, hasil penting lainnya adalah peningkatan pada pengendalian anggaran. Melalui penyusunan RAB dan cashflow sederhana, komunitas lebih mampu mengantisipasi kebutuhan logistik, memetakan sumber dana, serta mengurangi risiko pemborosan. Dengan demikian, deviasi biaya dapat diperkecil karena sejak awal pengeluaran dihubungkan langsung dengan rencana pekerjaan dan prioritas kegiatan.

PkM juga membantu komunitas memperbaiki pengelolaan risiko dan kesiapsiagaan terhadap perubahan mendadak. Risikoregister yang disusun mencakup potensi hambatan seperti perizinan, cuaca, keamanan, dan ketersediaan logistik/donasi, disertai mitigasi serta rencana kontinjensi. Praktik ini mendorong komunitas untuk merespons masalah secara terencana (Plan B), bukan hanya bereaksi ketika kendala sudah muncul.

Dari sisi tata kelola komunikasi dan dokumentasi, kegiatan menghasilkan peningkatan konsistensi proses koordinasi melalui rencana komunikasi, format notulen, dan status update mingguan. SOP dan checklist hari-H turut memperkuat standar pelaksanaan, terutama pada bagian briefing relawan, distribusi bantuan, dokumentasi kegiatan, serta kontrol lapangan. Akibatnya, miskomunikasi dan kekeliruan pelaksanaan dapat ditekan karena setiap kegiatan memiliki panduan dan mekanisme pengendalian yang jelas.

Sebagai keluaran akhir, PkM menghasilkan toolkit manajemen proyek siap pakai yang dapat direplikasi untuk kegiatan komunitas selanjutnya. Toolkit dan SOP tersebut meliputi template dokumen dan format pelaporan-evaluasi ringkas beserta lampiran bukti. Secara umum, program berhasil memperjelas peran, meningkatkan ketepatan jadwal, mengefisienkan pelaksanaan, serta memperbaiki kualitas laporan dan evaluasi sehingga komunitas memiliki dasar berkelanjutan untuk mengelola proyek sosial secara lebih efektif..

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Penguatan Manajemen Proyek Kegiatan Sosial dan Kemasyarakatan di Komunitas berhasil memperkuat kapasitas komunitas mitra dalam mengelola proyek secara lebih terstruktur. Melalui tahapan asesmen kebutuhan, pelatihan, workshop, serta pendampingan penerapan, komunitas memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai keterkaitan tujuan, ruang lingkup, peran tim, penjadwalan kerja, serta mekanisme pengendalian selama pelaksanaan. Proses ini berdampak pada peningkatan efektivitas koordinasi dan pelaksanaan kegiatan, karena kerja tim tidak lagi berjalan secara ad-hoc, melainkan mengikuti alur yang disepakati sejak awal.

Sebagai luaran, program menghasilkan toolkit manajemen proyek yang mencakup dokumen penting seperti project charter, WBS, SOP, dan perangkat pendukung lainnya. Dengan adanya perangkat kerja dan standar pelaporan yang lebih sistematis, komunitas mampu menjaga ketepatan waktu, meningkatkan kualitas dokumentasi dan evaluasi, serta lebih siap menghadapi risiko yang mungkin muncul selama kegiatan berlangsung. Kesimpulannya, PkM ini efektif memperkuat fondasi manajemen proyek komunitas sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan berikutnya secara berkelanjutan

REFERENSI

- Anheier, H. K. (2014). *Nonprofit Organizations: Theory, Management, Policy* (2nd ed.). Routledge.
- Baccarini, D. (1999). The logical framework method for defining project success. *Project Management Journal*, 30(4), 25–32. <https://doi.org/10.1177/875697289903000405>
- Bourne, L. (2015). *Stakeholder Relationship Management: A Maturity Model for Organisational Implementation* (2nd ed.). Routledge.
- Brown, W. A., & Guo, C. (2010). Exploring the key roles for nonprofit boards. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 39(3), 536–546. <https://doi.org/10.1177/0899764009334588>
- Bryde, D. J. (2003). Modelling project management performance. *International Journal of Quality & Reliability Management*, 20(2), 229–254. <https://doi.org/10.1108/02656710310456635>
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations* (5th ed.). Wiley.
- Crawford, L., & Helm, J. (2009). Government and governance: The value of project management in the public sector. *Project Management Journal*, 40(1), 73–87. <https://doi.org/10.1002/pmj.20107>
- Ebrahim, A., & Rangan, V. K. (2014). What impact? A framework for measuring the scale and scope of social performance. *California Management Review*, 56(3), 118–141.

- <https://doi.org/10.1525/cmr.2014.56.3.118>
- Hillson, D. (2002). Extending the risk process to manage opportunities. *International Journal of Project Management*, 20(3), 235–240. [https://doi.org/10.1016/S0263-7863\(01\)00074-6](https://doi.org/10.1016/S0263-7863(01)00074-6)
- Ika, L. A. (2009). Project success as a topic in project management journals. *Project Management Journal*, 40(4), 6–19. <https://doi.org/10.1002/pmj.20137>
- Kaplan, R. S. (2001). Strategic performance measurement and management in nonprofit organizations. *Nonprofit Management and Leadership*, 11(3), 353–370. <https://doi.org/10.1002/nml.11308>
- Kerzner, H. (2017). *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling* (12th ed.). Wiley.
- Kerzner, H. (2019). *Using the Project Management Maturity Model* (3rd ed.). Wiley.
- Love, P. E. D., Holt, G. D., Shen, L. Y., Li, H., & Irani, Z. (2002). Using systems dynamics to better understand change and rework in construction project management systems. *International Journal of Project Management*, 20(6), 425–436. [https://doi.org/10.1016/S0263-7863\(01\)00039-4](https://doi.org/10.1016/S0263-7863(01)00039-4)
- Maylor, H. (2010). *Project Management* (4th ed.). Pearson.
- Meredith, J. R., Mantel, S. J., & Shafer, S. M. (2017). *Project Management: A Managerial Approach* (9th ed.). Wiley.
- Müller, R., & Lecoivre, L. (2014). Operationalizing governance categories of projects. *International Journal of Project Management*, 32(8), 1346–1357. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2014.05.002>
- Osei-Kyei, R., & Chan, A. P. C. (2015). Review of studies on the critical success factors for public–private partnership (PPP) projects. *International Journal of Project Management*, 33(6), 1335–1346. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.02.008>
- Pinto, J. K., & Slevin, D. P. (1987). Critical factors in successful project implementation. *IEEE Transactions on Engineering Management*, EM-34(1), 22–27. <https://doi.org/10.1109/TEM.1987.6498856>
- PMI. (2017). *The Standard for Program Management* (4th ed.). Project Management Institute.
- Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)* (7th ed.). PMI.
- Shenhar, A. J., Dvir, D., Levy, O., & Maltz, A. C. (2001). Project success: A multidimensional strategic concept. *Long Range Planning*, 34(6), 699–725. [https://doi.org/10.1016/S0024-6301\(01\)00097-8](https://doi.org/10.1016/S0024-6301(01)00097-8)
- Situmorang, D. M. (2019). The Effect of Taxpayer Awareness and Fiskus Service on Performance of Tax Revenue With Taxpayer Compliance As Intervening Variables. *Management and Sustainable Development Journal*, 1(1), 26–37. <https://doi.org/10.46229/msdj.v1i1.98>
- Situmorang, D. M., & Pratama, E. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Implementasi Kebijakan Tax Amnesty. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 3(2), 115–122. <https://doi.org/10.35313/ialj.v3i2.4620>
- Turner, J. R. (2014). *Handbook of Project-Based Management* (4th ed.). McGraw-Hill.
- Young, R., & Poon, S. (2013). Top management support—almost always and never quite enough. *International Journal of Project Management*, 31(7), 943–957. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2012.11.008>
- Zwikael, O., & Smyrk, J. (2015). Project governance: Balancing control and trust. *International Journal of Project Management*, 33(4), 852–865. <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2014.10.012>